
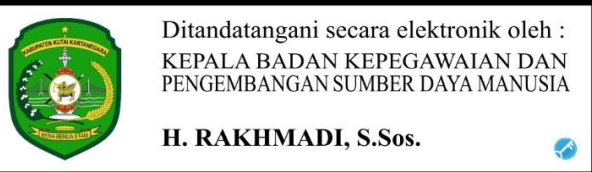


















**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>Nomor SOP</b>	<b>B-883/BKPSDM/MP.1/824/01/2023</b>	
	Tanggal Pembuatan	02-Jan-23
	Tanggal Revisi	25 September 2025
	Tanggal Efektif	02-Jan-23
	Disahkan Oleh	 
<b>Nama SOP</b>	<b>LAYANAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2022	1. Memiliki Kemampuan menganalisa permasalahan, memutuskan dan menetapkan berdasarkan prioritas 2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta sistem dan prosedur Administrasi Jabatan Fungsional 3. Menguasai penggunaan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan mekanisme dan prosedur Administrasi Jabatan Fungsional	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>	
SOP Perangkat Daerah lain SOP Kearsipan SOP Surat Keluar SOP Surat Masuk SOP Caraka	Jaringan Internet Komputer/Leptop Buku Agenda Administrasi Jabatan Fungsional Ballpoint/pensil	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Bila SOP Perangkat Daerah lain tidak berjalan dengan baik; -Sulit diketahui data PNS yang telah dan atau akan Administrasi Jabatan Fungsional -Tidak teragendakan dan tersipkannya Administrasi Jabatan Fungsional -Pengusulan Administrasi Jabatan Fungsional terhambat -Koordinasi antar lini tidak terbentuk sehingga salah satu stakeholders tidak mengetahui permasalahan	Agenda Administrasi Jabatan Fungsional Arsip Surat Masuk (Surat, Surat elektronik; e-mail, scan surat)berkenaan dengan layanan Administrasi Jabatan Fungsional SIASN SIMPEG	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### LAYANAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU/BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	JP	JF	ADM	JPTP	TPK PNS	PPK	BKN	GUBERNUR	MENTERI	KELENGKAPAN	WAKTU/ MENIT/ BERKAS	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
1	PEMOHON MENYAMPAIKAN BERKAS USULAN LAYANAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL SECARA (ONLINE/OFFLINE)											PERSYARATAN LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	10	CHEKLIST LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
2	PEJABAT PELAKSANA MENERIMA KELENGKAPAN BERKAS BERDASARKAN CHEKLIST LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL											CHEKLIST LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	10	VERIFIKASI DOKUMEN LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	JIKA DOKUMEN TIDAK SESUAI SOP, MAKA BERKAS DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON.
				LENGKAP											
3	PEJABAT FUNGSIONAL MENERIMA DAN MEMERIKSA SERTA MENGANALISA DOKUMEN USUL LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN NSPK DAN APLIKASI I-MUT BKN		TIDAK LENGKAP									VERIFIKASI DOKUMEN LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	30	HASIL VERIFIKASI DOKUMEN LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	JIKA JABATAN YANG DI TUJU TIDAK SESUAI DENGAN ANJAB ABK/FORMASI, MAKA BERKAS DIKEMBALIKAN PADA PEMOHON.
												LAMPIRAN DAFTAR HASIL INVENTARISASI LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	10	DAFTAR KOLEKTIF HASIL INVENTARISASI PROSES USUL LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
4	PEJABAT ADMINISTRATOR MENERIMA HASIL ANALISA DARI PEJABAT FUNGSIONAL TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL														
5	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA MENERIMA DAFTAR HASIL INVENTARISASI, KEMUDIAN MENGAGENDAKAN RAPAT TPK PNS											LAMPIRAN DAFTAR HASIL INVENTARISASI LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	10	UNDANGAN RAPAT TIM PENILAI KINERJA PNS	
	LANJUTAN														

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU/BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	JP	JF	ADM	JPTP	TPK PNS	PPK	BKN	GUBERNUR	MENTERI	KELENGKAPAN	WAKTU/ MENIT/ BERKAS	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
	LANJUTAN														
6	TIM PENILAI KINERJA PNS MENGADAKAN RAPAT DAN MEMBAHAS SERTA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL											LAMPIRAN DAFTAR HASIL INVENTARISASI LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	DOKUMEN HASIL RAPAT TPK PNS TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
7	PEJABAT ADMINISTRATOR MENERIMA HASIL RAPAT TIM PENILAI KINERJA PNS DAN MENYUSUN DRAFT TELAHAAN STAF UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT JPTP											BERITA ACARA DAN NOTULEN RAPAT TPK PNS TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	120	DRAFT TELAHAAN STAF LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
8	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA MENYAMPAIKAN TELAHAAN STAF KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN											DRAFT TELAHAAN STAF TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	30	TELHAAN STAF TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
9	PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN / PENOLAKAN ATAS REKOMENDASI DARI TPK PNS TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL											TELAHAAN STAF TENTANG PERTIMBANGAN REKOMENDASI HASIL RAPAT TIM PENILAI KINERJA PNS	180	PERSETUJUAN PPK TENTANG LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	JIKA USULAN TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN MAKA AKAN DILAKSANAKAN PEMBAHASAN PADA RAPAT TPK SELANJUTNYA
10	PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN MENYAMPAIKAN USUL PERTIMBNANGAN TEKNIS KE BKN TERKAIT PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL											DAFTAR USULAN	30	SURAT PERMOHONAN USUL PERTIMBANGAN TEKNIS BKN	
11	GUBERNUR MEMFASILITASI PERMOHONAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL SEBAGAI PERWAKILAN PEMERINTAH PUSAT YANG ADA DI DAERAH UNTUK DISAMPAIKAN KE MENTRI DALAM NEGERI											SURAT PENGANTAR	30	SURAT PENGANTAR USUL PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	
															

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU/BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	JP	JF	ADM	JPTP	TPK PNS	PPK	BKN	GUBERNUR	MENTERI	KELENGKAPAN	WAKTU/ MENIT/ BERKAS	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
12	MENTERI DALAM NEGERI MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL											REKOMENDASI		PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	
13	GUBERNUR MENERIMA REKOMENDASI/PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN MENYAMPAIKAN KE PPK (BUPATI)											REKOMENDASI		PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	
14	PPK BERSAMA JPT PRATAMA MENGAGENDAKAN PELANTIKAN PNS TERKAIT PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL											SK PELANTIKAN DAN SUMPAAH JANJI JABATAN		SK PELANTIKAN DAN SUMPAAH JANJI JABATAN	
15	PEMOHON MELAKSANAKAN PROESES PENGAMBILAN SUMPAAH JANJI JABATAN											SK PELANTIKAN DAN SUMPAAH JANJI JABATAN		DOKUMEN SURAT KEPUTUSAN LAYANAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	

